

Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2014)

¹Almanita Nurtari, ²Sri Fadilah, ³Kania Nucholisah

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹almanitanurtari@yahoo.com, ²srifadilah71@gmail.com, ³kania_gunawan@yahoo.com

Abstrak. Pemerintah daerah (Pemda) dalam melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat adalah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi yaitu dengan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disertai dengan pengungkapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik dan kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, maka total sampel yang digunakan adalah sebanyak 52 LKPD dari 2 tahun pengamatan. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator karakteristik Pemda kekayaan Pemda dan kekayaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, sedangkan umur Pemda, ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Indikator kompleksitas Pemda jumlah SKPD berpengaruh pengungkapan laporan keuangan, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh pengungkapan laporan keuangan. Karakteristik pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah secara simultan memberikan pengaruh sebesar 53,7% terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : Karakteristik Pemda, Kompleksitas Pemda, Pengungkapan Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

A. Pendahuluan

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan yang handal, baik dan akuntabel. Hakikatnya uang yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri berasal dari masyarakat, oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dioptimalkan, dapat dipertanggung jawabkan serta mendatangkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip tata kelola yang baik adalah prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara termasuk Indonesia. Sesuai dengan tuntutan dari masyarakat dan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah diharuskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara. Penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga harus berdasarkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksa oleh badan pemeriksa yang bebas sertamandiri.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban

kepada DPRD yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah yanghanya dilakukan secara sukarela untuk menjadi akuntabel secara publik.

Secara umum, Laporan BAPEPAM LK tahun 2011 menyatakan bahwa adanya pelanggaran dalam pengungkapan laporan keuangan yang merupakan porsi terbesar dari segala kasus yang terkait dengan emiten. Terkait dengan proyek IASB (*International Accounting Standard Board*) yang berhubungan dengan *Disclosure Initiative* belum selesai, sehingga aturan dan persyaratan pengungkapan yang bersifat “*principle base*” masih belum jelas.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), belum dilaksanakan secara maksimal. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011:39) menyimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan wajib Pemda tahun 2006 adalah sebesar 51,56%. Hasil Penelitian Lesmana (2010:46), pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia masih sangat rendah yaitu rata-rata nilai pengungkapan wajib sebesar 22 %, dengan nilai tertinggi sebesar 39 % dan terendah sebesar 13 %.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih tergolong rendah berpengaruh pada opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena pemeriksaan atas LKPD (BPK RI, 2014:82) bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas atau kehandalan sistem pengendalian intern.

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2015 yang dilakukan oleh BPK, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipeoleh pemerintah daerah di Indonesia selama tahun 2012 hingga 2014 sebanyak 527 LKPD dari total 1.552 LKPD yang diperiksa selama kurun waktu tersebut. Sisanya memperoleh opini selain WTP, yaitu sebanyak 860 LKPD memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) sebanyak 21 LKPD, dan sebanyak 144 LKPD Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Jadi, dari keseluruhan Pemerintah Daerah yang telah menyajikan laporan keuangan dengan wajar tanpa pengecualian yaitu sebesar 40%.

Suhardjanto dan Lesmana (2010:37) yang meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan 5 wajib di Indonesia. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa dua variabel karakteristik pemerintah daerah secara positif mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Umur Pemerintah Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah. Ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib LKPD.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis meneliti tentang karakteristik dan kompleksitas pemerintah daerah yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Diharapkan melalui penelitian ini, pemerintah menggunakannya sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan pelaporan keuangan dan pengungkapan

laporan keuangan dengan mempertimbangkan karakteristik pemerintah daerah.

B. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agen (manajer/pengelola) yang mana baik pemilik maupun pengelola merupakan pemaksimum kesejahteraan (Jensen and Meckling, 1976:5). Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara berbagai instansi pemerintah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen, karena pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

2. Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pengungkapan wajib informasi laporan keuangan pemerintah. Dalam SAP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual, terdapat 13 standar, yaitu:

- 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- 2) PSAP 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 3) PSAP 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- 4) PSAP 03 Tentang Laporan Arus Kas
- 5) PSAP 04 Tentang Catatan atas Laporan Realisasi Keuangan
- 6) PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan
- 7) PSAP 06 Tentang Akuntansi Investasi
- 8) PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap
- 9) PSAP 08 Tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
- 10) PSAP 09 Tentang Akuntansi Kewajiban
- 11) PSAP 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- 12) PSAP 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- 13) PSAP 12 Tentang Laporan Operasional

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Karakteristik entitas seringkali diproksikan dalam item-item atau perbandingan antar item (rasio) pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Pada penelitian-penelitian di sektor pemerintahan, karakteristik Pemerintah Daerah sering digunakan sebagai proksi dalam item-item pada laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu ukuran legislatif, umur administratif, kekayaan pemda, intergovernmental ratio, dan rasio kemandirian keuangan Daerah.

5. Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hilmi dan Martani (2012:5) yang membagi kompleksitas ke dalam dua kelompok, yaitu jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan jumlah penduduk.

6. Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan adalah informasi yang tidak ditutupi baik dalam bentuk laporan maupun membentuk lainnya mengenai hasil aktivitas unit usaha. Menurut Chariri dan Ghozali (2007:393), terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

- 1) Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure), adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh Standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan yang cukup merupakan pengungkapan yang minimum yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure), merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar atau peraturan yang berlaku (Naim dan Rakhman, 2000:73).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2014 yaitu sebanyak 27 LKPD karena didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang digunakan dapat menyajikan informasi yang up to date sehingga bisa menggambarkan kondisi pemerintah daerah terkini dan telah berdasar pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan populasi diperoleh 26 Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kriteria dan akan dijadikan sampel yaitu 17 kabupaten dan 9 kota.

Koefisien regresi variabel independen yaitu pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan dihitung menggunakan software IBM SPSS Statistics 20 dan diperoleh outputnya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-54,533	39,891		-1,367	,179
ULEG	,047	,200	,048	,238	,813
AGE	,033	,038	,110	,867	,391
WEALTH	4,093	1,879	,485	2,178	,035
IRGOV	,028	,306	,018	,927	,092
MANDIRI	4,414	1,807	,310	2,442	,019
SKPD	,158	,041	,467	3,888	,000
PENDUDUK	-,905	2,033	-,102	-,445	,65

a. Dependent Variable: DISCLOSURE

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah diperoleh, maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -54,533 + 0,047X_{1.1} + 0,033X_{1.2} + 4,093X_{1.3} + 0,028X_{1.4} + 4,414X_{1.5} + 0,158X_{2.1} - 0,905X_{2.2}$$

Dimana :

Y = Pengungkapan laporan keuangan

X_{1.1} = Ukuran legislatif

X_{1.2} = Umur administrasi pemerintah daerah

X_{1.3} = Kekayaan pemerintah daerah

X_{1.4} = Intergovernmental revenue

X_{1.5} = Kemandirian daerah

X_{2.1} = Jumlah SKPD

X_{2.2} = Jumlah Penduduk

Pengujian secara parsial dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing elemen profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keuangan. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,015 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 44 untuk pengujian dua arah. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-54,533	39,891		-1,367	,179
ULEG	,047	,200	,048	,238	,813
AGE	,033	,038	,110	,867	,391
WEALTH	4,093	1,879	,485	2,178	,035
IRGOV	,028	,306	,018	,927	,092
MANDIRI	4,414	1,807	,310	2,442	,019
SKPD	,158	,041	,467	3,888	,000
PENDUDUK	-,905	2,033	-,102	-,445	,65

a. Dependent Variable: DISCLOSURE

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dari 5 proksi yang digunakan pada karakteristik pemerintah daerah, diketahui 2 proksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yakni kekayaan pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah. Ukuran legislatif yang diukur berdasarkan jumlah anggota DPRD tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat karena banyaknya jumlah anggota DPRD tidak dapat menentukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah meningkat. Selain itu, pengawasan yang dilakukan para anggota DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah belum dapat berjalan dengan baik. Umur administratif pemerintah daerah tidak berpengaruh dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat karena umur tidak serta memotivasi dan mendorong tingkat pengungkapan yang lebih besar dari suatu daerah. Umur pemerintah daerah yang lebih tua tidak dapat menentukan mengungkapan yang lebih baik dibandingkan dengan

pemerintah daerah yang memiliki umur lebih muda yang memiliki personil PNS berkualitas yang berusia muda.

Intergovernmental revenue yang diukur dengan perbandingan antara total pendapatan transfer (dana perimbangan) dengan pendapatan asli daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah tidak sebanding dengan jumlah PAD yang diterima karena jumlah pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak dijadikan sebagai dana utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, artinya semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah maka semakin memberikan tekanan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syafitri (2012) yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, artinya semakin tinggi kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap semakin luasnya tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan sebagai tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah digunakannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lesmana (2010) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin meningkatnya kekayaan pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa dari 2 proksi yang digunakan pada kompleksitas pemerintah daerah, diketahui salah satu proksi yang digunakan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yakni jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hasil ini sama dengan hasil penelitian Patrick (2007) yang menyatakan bahwa functional differentiation berpengaruh positif pada penerapan sebuah inovasi baru, yaitu GASB 34. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin banyak jumlah SKPD akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Berbeda halnya dengan jumlah penduduk yang tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, karena jumlah penduduk tidak serta merta mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan pengungkapannya. Dengan sedikitnya jumlah penduduk maka kompleksitas semakin menurun yang kemudian menyebabkan peningkatan tingkat pengungkapan (pengungkapan menjadi lebih baik).

Selanjutnya untuk menguji apakah secara simultan karakteristik pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan, maka dilakukan pengujian secara simultan.

Tabel 3.3 Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,299,952	7	185,707	7,280	,000b
	Residual	1,122,386	44	25,509		
	Total	2,422,338	51			

a. Dependent Variable: DISCLOSURE

b. Predictors: (Constant), PENDUDUK, IRGOV, SKPD, MANDIRI, AGE, ULEG, WEALTH

Karakteristik pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Artinya semakin meningkat karakteristik dan kompleksitas pemerintah daerah akan menghasilkan pengungkapan laporan keuangan yang baik di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah (agen) kepada pemliki kepentingan (*principal*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari lima indikator yang digunakan mengukur karakteristik pemerintah daerah, terdapat dua indikator yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat, dimana semakin besar kekayaan pemerintah daerah akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah. Kemudian kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah.
2. Dari dua indikator yang digunakan mengukur kompleksitas pemerintah daerah, hanya satu indikator yaitu jumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Kabupaten/kota dengan jumlah SKPD lebih banyak cenderung memiliki pengungkapan laporan keuangan lebih tinggi.
3. Karakteristik pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Karakteristik pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah secara simultan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2014). *Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan*.

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Biro Pusat Statistik Indonesia. (2013 & 2014). *Daerah Dalam Angka*.
- Chairi, Anis dan Imam Ghozali. 2003. *Teori Akuntansi*. Semarang: BP UNDIP.
- Hilmi, A.Z. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Jensen, Michael C. and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3. P. 305-360.
- Lesmana, S. I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Pemeriksaan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba empat, 2012.
- Suhardjanto, D., Yulianingtyas, R. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret.
- Syafitri, Febriyani. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Program S1 Ekstensi Akuntansi, Depok.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.